

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Program *One Village One Product* atau yang lebih dikenal dengan sebutan OVOP, adalah suatu program berbasis *collaborative governance* yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam melaksanakan program tersebut, melalui pendekatan perekonomian pada sektor pemasaran yang diinisiatifkan oleh gubernur Morihiro Hiramatsu di Oita Prefecture di Jepang pada tahun 1997. Trobosan OVOP ini dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sumberdaya manusia di masyarakat desa pada pengolahan produk tertentu untuk meningkatkan perekonomian pedesaan melalui pengolahan produk lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakatnya pada *level grassroot* serta untuk mengangkat produk lokal (Burhanuddin,2005:144).

Dalam konteks pemerintahan Indonesia program *one village one product* atau lebih dikenal dengan OVOP sudah dirilis sejak tahun 2008 sebagai salah satu program prioritas untuk pembangunan nasional dimana, hal tersebut didukung dengan adanya landasan-landasan hukum dalam pelaksanaan OVOP di Indonesia. Landasan-landasan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) (Rudi,2014).
2. Undang-undang nomer 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Undang-undang nomer 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian.

Tujuan dari adanya program OVOP di Indonesia adalah untuk menggali potensi-potensi lokal didaerah, kerena dengan hal tersebut maka akan mendorong masyarakatnya menggali serta menciptakan prodak-prodak baru yang mimiliki ciri khas dan kearifan lokal di masing-masing daerahnya. Implementasi program OVOP ini sudah diinisiasikan di 73 lokasi di seluruh Indonesia yang dibina dan dikembangkan oleh 27 koprasia melalui 13 provinsi melalui konsep OVOP. Beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi besar untuk pengembangan OVOP adalah sentral anyaman rapolah (Tasikmalaya), kerajinan grabah (Purwakarta), sentral kripik pisang, singkong dan kemplang ( Bandar Lampung) dan beberapa wilyah lainnya.

Salah satu daerah yang sudah mejalankan program OVOP adalah Kabupaten Bantul, sebagai salah satu trobosan kebijakan publik dalam program pengentasan kemiskinan (PRONANKIS), melalui program OVOP pemerintah Kabupaten Bantul mentargetkan 10 prodak dimasing-

masing kecamatan yang unggulan, khas, berkualitas, berdayasaing, dan berdaya jual yang tinggi. Setelah dijalankan sekitar tiga tahun berjalan program ini menunjukkan dampak positif untuk masyarakatnya dimana program ini mampu membantuk menggerakkan roda perekonomian di masyarakat, di Kabupaten Bantul sendiri dari 18 kecamatan sudah terdapat 28 kelompok usaha sasaran OVOP. Namun dalam pelaksanaan program ini masih mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu: pendanaan dan modal, serta pemasaran produk.

Dengan adanya kendala yang seperti itu membuat pertumbuhan usaha menjadi terhambat dan sulit untuk berkembang pesat, untuk menyelesaikan masalah tersebut, *collaborative governance* sangat diperlukan. *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik *stakeholders non-state* dalam pembuatan atau pelaksanaan program secara formal yang bersifat konsus, dan dileberatif yang tujuannya untuk mengimplentasikan atau mengatur program publik, yang dimaksud *stakeholders nonstate* dalam penelitian ini adalah pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya *collaborative governance* pemerintah Kabupaten Bantul akan mendapatkan saran atau nasihan dan mitra kerja dalam pengembangan program OVOP. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait *calloborative governace* dalam program OVOP tersebut. Dengan judul ***calloborative governace program one village one product (OVOP) di Kabupaten Bantul.***

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bantul terkait dengan program *one village one product* (OVOP) karena berbeda dengan wilayah lain hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program ini tergolong sukses karena dalam kurun waktu tiga tahun bisa memajukan setiap kecamatan, dibuktikan dengan adanya usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakatnya hal ini dapat menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Selain hal tersebut Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Kabupaten Bantul cukup berbeda dimana pelaksanaan program OVOP terlibat untuk pengolahan dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi contohnya pengolahan singkong sebagai bahan baku pembuatan mie yang diproduksi dari kecamatan pundong yang dikenal oleh masyarakat dengan nama mie des.

Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung disana masyarakatnya hanya sebagai penyedia bahan mentah kopi sehingga keterlibatan masyarakat dalam program OVOP masih sangat terbatas hal ini menjadi penuntasan kemiskinan kurang maksimal. Dilihat dari perbandingan tersebut, jelas Kabupaten Bantul lebih unggul dalam mengimplementasikan Program OVOP ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan karena dengan semakin banyaknya keterlibatan masyarakat otomatis angka pengangguran akan berkurang. Program OVOP tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan potensi ekonomi lokal semata akan tetapi adanya

kesesuaian Program OVOP dengan *branding* yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul yaitu *The Harmony Of Nature and Culture* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Harmoni Alam dan Budaya”, dimana Program OVOP sendiri mendorong sasaran program yaitu masyarakat miskin di desa-desa di Kabupaten Bantul untuk membuat produk andalan dengan muatan kearifan lokal dan budaya serta menggunakan bahan baku dari daerah Bantul.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

“Bagaimana *collaborative governance* dalam program OVOP di Kabupaten Bantul ?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui *collaborative governance* program *one village one product* (OVOP) di Kabupaten Bantul.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Teoritik (akademis)

- a. Pengamplikasian dari teori *collaborative governance* untuk menganalisis tingkat keberhasilan program OVOP.
- b. Pengembangan program OVOP dalam pengentasan kemiskinan.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan *collaborative*

*governance* serta peningkatan efisiensi efektifitas program OVOP, dan untuk masyarakatnya program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan serta membuka peluang usaha masyarakat.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

### 1. Definisi *Collaborative Governance*

Menurut Ansell and Gash (2007: 545) *collaborative governance* merupakan salah satu tipe *governance* dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik.

Definisi *Collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:544) menyatakan, *collaborative governance* yaitu gabungan dari beberapa peraturan dimana terdapat satu atau lebih dari lembaga publik yang mengikut sertakan dirinya secara langsung *stakeholder nonstate* dalam pembuatan kebijakan publik yang secara formal berorientasi pada konsensus dan deliberatif yang mempunyai tujuan untuk menciptakan atau pengimplementasian kebijakan publik yang telah diatur dalam program atau asset. *Collaborative* dalam konteks ini menjelaskan bagaimana upaya-upaya pemerintah dan *stakeholder nonstate* berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat atau publik.

Menurut Agranoff & McGuire (Chang, 2009:76-77) sebagai berikut: secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, karena penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan multi sektoral dan membutuhkan interaksi keterlibat dalam kegiatan publik di antara berbagai organisasi yang terkait. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.

Konsep ini memberi penekanan hubungan kolaborasi yang sukarela dan horizontal sedangkan dalam realita kolaborasi yang terbentuk karena saling mendukung dan melengkapi dalam mengelola permasalahan publik selain itu dalam penulisan ini kolaborasi dalam beberapa kegiatan cenderung tersentralisasi. Sedangkan menurut Culpepper dalam (Sranko 2011:211) definisinya adalah *Collaborative governance* adalah ketersediaan institusi yang mempromosikan interaksi antara pemerintah dan non-aktor pemerintah, tanpa aktor-aktor negara memonopoli pendefinisian masalah, penetapan tujuan, atau metode pelaksanaan. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri apabila pemerintah menjadi *leader* dan pembuat kebijakan sehingga ada kemungkinan lebih mendominasi dan masih membutuhkan partisipasi dari *stakeholders* lain.

Menurut Tang & Masmanian (2008:5) mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai sebuah konsep yang mendeskripsikan proses

membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sektor publik, profit dan nonprofit dalam rangka meningkatkan (membangun) atribut unik dan sumberdaya dari masing- masing.

Fosler (Dwiyanto, 2010:261) meggambar terkait konsep kolaborasi bahwa kerjasama yang dijalankan secara kaloboratif banyak melibatkan kerjasama dua intansi atau lebih pada dasarnya mempunyai visi dan tujuan yang selaras untu diwujudkan secara bersama-sama, yang intensif dimana didalamnya terdapat upaya secara sadar ada cara pencapaian tujuan dalam aligment, sumber daya, agenda, dan aktivitas. untuk itu kedua instansi tersebut melakukan kolaborasi secara vertikal yang dimulai dari sasaran kerjaatau program, dan strategi yang tepat mereka siapkan dalam melakukan aktivitas untuk mecapai tujuan tersebut karena dengan bekolaborasi dinilai akan lebih efektif dan efesien dari tujuan yang dimiliki masing-masing.

Sedangkan menurut Sudarmo (2011:102-104) pada umumnya, *collaboration* dipandang sebagai perselisihan yang bisa disebabkan karena banyaknya kebijakan, dan respon dari organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan yang menjadi



isu-isu semakin meluas keranah publik dari batasan norma-norma, kapasitas pemerintah pusat umumnya semakin meningkat serata pada diluar pemerintah daerah atau kota serta inisiatif spontan ditujukan untuk masyarakat luas.

Menurut Ansell and Gash, 2009 (Sudarmo, 2009:123) dijelaskan bahwa kolaborasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut : kolaborasi yang diartikan secara normatif, dan kolaborasi yang diartikan dalam proses, penjelasan kolaborasi dalam artian normatif adalah bentuk aspirasi atau tujuan filosofi untuk pemerintah dalam melakukan interaksi dengan partner atau mitra kerjanya, sedangkan kolaborasi yang diartikan dalam proses adalah sekumpulan cara atau proses untuk mengatur semua institusi dalam hal masuk dalam institusinya adalah pemerintah dan lembaga *non-state* yang dilibatkan dengan porsi dan tujuannya. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada analisis kolaborasi dalam arti proses karena peneliti lebih menekankan pada sejauh mana kolaborasi yang dilakukan para *stakeholder* untuk menjalankan dan meyukseskan program *one village one product* (OVOP) di Kabupaten Bantul.

Menurut Wanna dalam (Zaenuri,2016: 15) menyatakan bahwa kolaborasi melibatkan beberapa dimensi sebagai berikut yaitu :*Pertama* kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat, *kedua* kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menyelaraskan kegiatan antara aktor, *ketiga* kolaborasi dapat menjadi

proses negosiasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat *trade-off*, keempat kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan pemaksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri, kelima kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan. Akhirnya, kolaborasi dapat menumbuhkan komitmen pribadi untuk kegiatan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis, pengembangan motivasi internal, keputusan, dan keterlibatan. Dari keenam dimensi tersebut tidak serta merta berjalan konsisten akan tetapi bisa bersifat eksklusif.

Thomson dan Perry (2007:3) mendefinisikan kolaborasi adalah proses di mana para aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah bersama. Ini berarti suatu proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

- 1) *Governance* (pemerintahan): Para pihak yang berkolaborasi harus memahami bagaimana cara untuk bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan bersama.

- 2) *Administration* (administrasi): Kolaborasi bukanlah usaha self administering. Organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk mencapai tujuan tertentu.
- 3) *Organizational Autonomy* (otonomi organisasi): Dimensi kolaborasi ini menjelaskan dua dinamika potensial dan

Alternatif sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena sudah mempunyai legitimasi yang kuat karena melibatkan beberapa kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi, dan dapat mengambil keputusan bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adanya kolaborasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program OVOP dikarenakan kompleksitas dan saling ketergantungan antar instansi. Dalam pengembangan program OVOP tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja karena untuk melaksanakannya melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda seperti keuangan, pelatihan, pemasaran, promosi, kebudayaan, dan pembinaan sehingga hal ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-masing. Adanya *collaborative governance* ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk *collaborative governance* yang bervariasi antara lain: manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi,

dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan.

a. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

DeSeve (2007:50) dalam Sudarmo (2011:110-116) berpendapat bahwa tolak ukur untuk menilai keberhasilan kolaborasi dalam sebuah program dapat diukur melalui beberapa item yang dijadikan sebagai landasan *collaborative governance* yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Tipe jenis struktur jaringan

Mendeskripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik jaringan, yang kaitnya dengan bentuk *networked structure*, seperti *clusture* dan *spoke* yang digunakan.

2) Komitmen terhadap tujuan

Komitmen terhadap tujuan menjelaskan bahwa sebuah kerjasama atau jaringan perlu diadakan, hal tersebut karena untuk perhatian dan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah tujuan-tujuan positif yang dituliskan dalam misi umum sebuah organisasi pemerintahan.

- 3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan

Sebuah jalinan kepercayaan antara semua partisipan dalam penyampaian informasi maupun usaha dari *stakeholder* lainnya dalam sebuah jaringan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

- 4) *Governance*

salah satu indikator yang didalamnya memuat rasa kepercayaan antara semua pihak atau para pelaku, terdapat batasan-batasan siapa saja yang boleh terlibat dalam proses pelaksanaan program ataupun kebijakan publik, terdapat aturan yang jelas yang telah disepakati bersama, dan adanya kebebasan dalam menentukan bagaimana kolaborasi yang akan dijalankan.

- 5) Akses terhadap kekuasaan

Sebuah tolak ukur keberhasilan yang memiliki prosedur atau ketentuan yang jelas dan diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan tugasnya.

- 6) Pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab

Dalam terkait dengan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lain dengan berbagai keputusan yang diputuskan bersama kelompok anggota jaringan, dan dengan demikian dibuatlah pertanggung jawaban untuk

mencapai hasil yang diinginkan setelah pelaksanaan dari keputusan yang sudah dibuatkan.

7) Berbagi informasi

Sebuah akses untuk para anggota, baik dalam perlindungan privasi, dan pembatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota selama itu masih diteriam oleh seluruh anggota yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi. Kemudahan yang diberikan untuk mengakses informasi mencakup dalam hal sistem, *softwere*, dana beberapa hal prosedur yang memudahkan dan aman untuk mengakses informasi.

8) Akses Terhadap Sumberdaya

Ketersedian sumber daya alam, manusia teknis, dan keuangan yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* yaitu struktur organisasi pemerintahan diamanatkan yang secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada kebebasan, dan berorientasi pada kosensus yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengeloha program atau asset secara bersama-sama.

## 2. *Governance*

*Governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah), dalam arti sempit *governance* adalah sebagai lembaga, tetapi *governance* dalam arti yang luas adalah proses pemerintahan (Dwipayana dkk, 2003:8). Dalam konteks *govement* lebih diartikan sebagai “mereka” sedangkan *governance* lebih diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini kontek *govement* dilihat seolah-oleh hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari kontek *governance* atau “kita” memberikan penjelasan bawasanya terdapat peleburan antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena *governace* ini melibatkan semuanya dalam berbagai proses *governance*.

Konsep *governance* itu sendiri menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagai salah satu aktor yang ikut dalam proses *governance* dan tidak harus menjadi aktor yang paling menentukan, dalam implikasinya peran dari pemerintah penyedia pelayan publik atau pembangun infrastruktur yang bisa jadi akan bergeser menjadi pendorong sebagai pihak yang memfasilitasi pihak lain atau sektor swasta yang memiliki peran aktif dalam mewujudkan upaya kebijakan atau program tersebut (Sumarto, 2004:2).

Menurut Cheema (Keban, 2008:38) *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Menurut Kapucu, Naim; Farhod Yuldashev, and Erlan Bakiev , (2009:45) *Governance* adalah sebuah proses pembuatan keputusan dengan

melibatkan aktor *state* dan *nonstate*. *Governance* memandu proses yang mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam sektor privat, publik dan sipil.

Sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam (Sedarmayanti,2003:5) berpendapat *Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Karena itu instansi dari *governance* meliputi 3 intitusi yaitu sebagai berikut: *state* ( pemerintah), *society* (masyarakat), dan *private sector* ( sektor swasta atau dunia usaha)

Menurut Dwiyanto (2005: 79-81) Menjelaskan bahwa *governance* adalah pelaksana fungsi *governing* yang secara bersama-sama pihak pemerintah dengan pihak instansi-instansi lainnya seperti LSM, perusahaan dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan program maupun kebijakan publik hal ini menunjukan bawasannya kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah atau menjadi urusan dari pemerintah. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Sedangkan menurut bevir dalam Zaenuri (2016: 20) menjelaskan bahwa *governance* adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa spek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ada beberapa dimensi penting dari *governance*.



Dwiyanto (Nurhaeni, 2010:25-26) menjelaskan bahwa dimensi pertama dari *governance* adalah dimensi kelembagaan, yang menjelaskan bahwa *governance* merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua dari *governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

### 3. Program OVOP

#### a. Pengertian Program

Menurut pendapat (Zainudin,2014:4) program adalah sebuah rancangan atau rencana pelaksanaan kegiatan dengan asas serta usaha dalam melaksanakan kegiatan atau program. Sedangkan menurut (Wijayanti,2016) Program adalah sebuah unsur utama yang harus ada untuk menciptakan suatu kegiatan, yang dijelaskan dalam beberapa aspek sebagai berikut :

- 1) Tujuan dari kegiatan yang akan dicapai
- 2) Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
- 3) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- 4) Strategi pelaksanaan.

Melalui adanya program dalam setiap rencana kegiatan akan lebih tersusun dan memudahkan dalam pengoprasiannya. Hal ini didukung dengan dengan pengertian program yang dijelaskan sebagai berikut, program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan atau program yang telah di susun untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selaras serata secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan( Wijayanti,2016).

Menurut Siagian (2006:127) Program adalah buah bentuk rencana yang akan dilaksanakan sebagai salah satu unit ataupun kumpulan dari kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau pengimplemntasian yang berasal dari kebijakan langsung yang memiliki kesinambungan yang terjadi didalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang. Dari penjelasan itu dapat ditekankan bahwa program mempunyai 3 unsur penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- 2) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- 3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program ialah sekumpulan bentuk rencana atau rancangan yang akan dilakukan sebagai satu kesatuan atau unit dari serangkaian kegiatan yang menjadi bentuk realisasi atau implementasi dari sebuah kebijakan langsung yang mempunyai kesinambungan dalam sebuah organisasi yang melibatkan beberapa atau sekelompok orang.

#### b. Program OVOP

program OVOP adalah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada tingkat desa melalui serangkaian kegiatan-kegiatan usaha yang produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Sebagai salah satu usaha yang dilakukan adalah peningkatan nilai-nilai produk lokal atau domestik unggulan yang dapat bersaing dipasaran dengan peningkatan mutu dan kualitas agar bisa bersaing diarah pasar domestik maupun internasional.

OVOP merupakan suatu program integratif yang berupaya dalam meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat serta daerahnya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat, dan sekaligus, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah. Produk khas lokal yang telah dilakukan secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi serasi sumber daya alam

ataupun produk budaya lokal yang memiliki potensi pasar maupun ekspor (Andriani,2017:13).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Program *One Village One Product* atau yang lebih dikenal dengan sebutan OVOP adalah suatu program berbasis *collaborative governance* yang di maksudkan untuk meningkatkan ekonomi pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada level *grassroot* dan membantu pengembangan kemampuan masyarakat desa pada produk tertentu serta untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada di setiap daerah dan mendorong daerah-daerah untuk dapat memunculkan produk-produk andalannya.

#### 1) Tujuan dan Sasaran program OVOP

Menurut *Blue Print* dalam (Widiyati,2017:25) tujuan program OVOP adalah sebuah program yang mengupayakan *suistainability* (kesinambungan) dalam meperluas akses pasar yang dihasilkan daerah atau desa untuk membantu peningkatan pendapatan pelaku petani atau usaha disuatu tempat sehingga mampu meningkatkan angka kesejahteraan untuk masyarakatnya.

#### 2) Prinsip-prinsip program OVOP

Prinsip dasar dari program OVOP adalah masyarakat daerah atau desa yang mampu menggali hasil komoditasnya atau prodak unggulannya yang berkesinambungan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, sedangkan menurut diputi Bidang Pengkajian UMKM

(2010) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip program OVOP sebagai berikut:

- a. Prinsip lokal tapi global
- b. Kemandirian dan kreatif
- c. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

### 3) Kriteria dan tahapan pengembangan program OVOP

Penetapan kriteria dalam pengembangan komoditas atau produk menjadi sesuatu yang sangat penting dalam program OVOP, berikut kriteria untuk pengembangan komoditas atau produk menurut Kementerian koperasi dan UMKM (2010) sebagai berikut:

- a) Merupakan produk unggulan desa/daerah atau kompetensi intidan telah dikembangkan secara turun-temurun.
- b) Merupakan produk khas dan unik dari daerah/desa.
- c) Memiliki kualitas dan tampilan yang baik.
- d) Memiliki peluang pasar yang luas baik domestik maupun internasional.
- e) Memiliki nilai tambah atau jual yang tinggi.
- f) Manjadi pengembangan untuk perekonomian lokal atau setempat.

## **F. DEFINISI KONSEPTUAL**

1. *Collaborative governance* yaitu struktur organisasi pemerintahan diaman yang secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada

kebebasan, dan berorientasi pada kosensus yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset secara bersama-sama.

2. *Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

3. Program *One Village One Product* atau yang lebih dikenal dengan sebutan OVOP, adalah suatu program berbasis *collaborative governance* yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada level *grassroot* dan membantu pengembangan kemampuan masyarakat desa pada produk tertentu serta untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada di setiap daerah dan mendorong daerah-daerah untuk dapat memunculkan produk-produk andalannya, serta untuk mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang ada disetiap daerah dan mendorong daerah-daerah untuk dapat memunculkan produk-produk andalannya.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan *Collaborative Governance* pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program OVOP sebagai salah satu trobosan untuk pengentasan kemiskinan, yang

diukur dengan Indikator-indikator *Collaborative Governance* sebagai berikut:

1. Jenis struktur jaringan
2. Komitmen terhadap tujuan
3. adanya saling percaya diantara para
4. *Governance*
5. Akses terhadap kekuasaan
6. Pembagian pelaku dalam akuntabilitas / tanggungjawab
7. berbagi informasi
8. Akses terhadap sumberdaya

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif ditekankan pada penempatan (*generation of theory*) dan menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang dikonstruksi sebagai suatu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata dari pada kuantifikasi dalam mengumpulkan analisis data, yang oleh karena itu penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian atau penyelidikan dalam memahami permasalahan sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik/lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Moleong, 2009). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif,

penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat (Notoatmojo, 2012).

Penelitian *Collaborative Governance* ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena untuk mengangkat fakta, fenomena dan keadaan yang ada, sehingga penelitian ini bisa melihat situasi sosial lebih mendalam, dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait *Collaborative Governance* pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyukseskan program OVOP.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul tepatnya pada bagian Tim Koordinasi Penaanggulan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui program OVOP.

## 3. Unit analisis

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian ( Hamidi, 2005:75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten



Bantul tepatnya pada bagian Tim Koordinasi Penaanggulan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data primer

Data primer (*Primary Data*) adalah suatu objek atau dokumen original material menatah dari pelaku yang disebut "*first-hand imformation*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Sumber data yang di peroleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti sendiri yang berupa kata atau frase yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada sumber yang telah ditetapkan seperti ketua TKPK, beberapa SKPD pelaksanaan progam OVOP, swasta dan masyarakat( Moleong, 2009).

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau dari data yang di kumpulkan dari tangan kedua (*Second-Hand Information*). Data yang di kumpulkan dari komentar, interpretasi atau pembahasan tentang original atau melalui sumber-sumber lain yang tersedia di sebut data sekunder Umasekaran dalam (Widiyanti,2017).

Sumber data yang diperoleh dari berbagai macam sumber lainnya dan bacaan. Data sekunder juga dapat berupa buletin, publikasi majalah, lampiran-lampiran dari berbagai organisasi, dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi tesis, sekripsi, dan hasil survey, serta lain sebagainya yang dapat memperkuat temuan dan melengkapi informasi yang ada melalui pengamatan dan wawancara langsung. Data sekunder dalam dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dari BAPEDA dan TKPK Kabupaten Bantul yang didapat oleh peneliti melalui internet maupun secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran penelitian atau dengan bercakap-cakap berhadapan muka langsung dengan orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan kepada pengelola TKPK Kabupaten Bantul, masyarakat yang ikut dalam program OVOP untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan judul penelitian. Adapun menurut (Moleong,2010:186) berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan dua belah pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang memberi jawaban itu.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian pustaka bisa berupa buku, arsip, artikel yang digunakan sebagai bahan penunjang dari hasil wawancara. Menurut (Sugiyono, 2013:240) dokumen adalah catatan peristiwa yang telah dilakukan yang berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang.

c. Observasi

Menurut Nasution dalam (Sugiyono,2013:240) observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan untuk mencari fakta-fakta dalam penelitian. Adapun menurut Sutrisno Hadi ( Sugiyono,2010:203) menyatakan bahwa observasi yaitu suatu proses yang kompleks dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan definisi observasi adalah pengamatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja berdasarkan data dan fakta yang selanjutnya akan di proses untuk kebutuhan penelitian.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses menjabarkan data secara berurutan dengan membuat pola atau penjelasan berdasarkan data yang sudah di kelompok–kelompokan agar memudahkan menganalisis dan memahami. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi kuantitatif yang dilakukan berdasarkan pemahaman yang dikaitkan kedalam fakta-fakta yang ditemukan dan informasi yang didapatkan dengan memahami masalah yang muncul dimasyarakat (Moleong, 2009).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data kualitatif sebagai model alir yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Salim, 2006) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari integrasi dari sebuah kegiatan analisis data. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemusatan, pemilihan, transformasi, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang didapat di lapangan. Reduksi dilakukan dalam analisis data ini dimulai dengan membuat ringkasan, menulis memo, menelusuri tema, dan sebagainya dengan tujuan untuk menganalisis informasi yang relevan dan tidak untuk data pada penelitian.

c. Penyajian data

Data adalah kumpulan data atau informasi yang tersusun secara sistematis untuk pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif selain itu juga dapat berbentuk diagram, tabel, bagan dan matrik.

d. Kesimpulan dan verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul atau tersusun yang dicocokkan kembali pada reduksi data dan *display* data, agar kesimpulan yang didapat bisa disepakati sebagai laporan tertulis yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.